

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR PRIMA SEJAHTERA  
TAHUN 2024**



**Ruko Sutera Niaga I No. 55, Kota Tangerang Selatan, Banten  
TELEPON: 02153128835**



## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

### Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT. BPR Prima Sejahtera
Alamat	Komplek Ruko Alam Sutera - Sutera Niaga I No.55 Jalan Raya Serpong - Kota Tangerang Selatan (15325)
Nomor Telepon	(021) 53128835

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Prima Sejahtera pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

PT. BPR Prima Sejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Prima Sejahtera dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Tangerang Selatan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Prima Sejahtera didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Prima Sejahtera .

PT. BPR Prima Sejahtera telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Prima Sejahtera selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Prima Sejahtera terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Nama	Vivin Novitasari Sutrisno
<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.	

2.	Nama	Erry Hermawan
<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.		

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Prima Sejahtera.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan



debitur kasus per kasus.

e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti

f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Thony Wijaya
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li><li>Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :<ol style="list-style-type: none"><li>Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.</li><li>Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li></ol></li><li>Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :<ol style="list-style-type: none"><li>Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.</li><li>Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li></ol></li><li>Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.</li><li>Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada OJK.</li><li>Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.</li><li>Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan secara optimal.</li></ol>	
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li></ol>	



3. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
  - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
  - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - c) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
  - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
7. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada OJK.
8. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan secara optimal.

#### **Rekomendasi Kepada Direksi:**

1. Menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahunan tahun 2024.
2. Dewan Komisaris memastikan telah terlaksananya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
3. Pemanfaatan Anggaran pelatihan 2024 yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.
4. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara rutin dan memberikan masukan kepada Direksi untuk pengembangan bisnis.
5. Melakukan pemetaan pasar sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan pasar perkreditan.
6. Melakukan evaluasi kredit lebih teliti dan memperkuat proses pengajuan kredit sampai dengan checking dan appraisal dengan benar.
7. Fokus pada pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah dan menekan jumlah NPL.
8. Monitoring seluruh kegiatan operasional secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan kegiatan operasional lebih maksimal.

#### **4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

nihil.

#### **5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

nihil.



## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Thony Wijaya
	Persentase Kepemilikan (%)	45,00
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Vivin Novitasari Sutrisno
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Erry Hermawan
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Thony Wijaya
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham



Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Thony Wijaya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Prima Nadi
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Prima Nadi
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
3.	Nama	Thony Wijaya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Prima Dewata
	Persentase Kepemilikan (%)	45,00
4.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Prima Dewata
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00

nihil

Kepemilikan Saham Komisaris Utama pada Perusahaan lain yaitu pada PT. BPR Prima Nadi memiliki 40 persentase saham dan di PT. BPR Prima Dewata memiliki 45 persentase saham dan untuk Komisaris kepemilikan saham di PT. BPR Prima Nadi dan PT. BPR Prima Dewata masing masing sebesar 10 persen saham

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Vivin Novitasari Sutrisno
----	------	---------------------------



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Erry Hermawan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Thony Wijaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Yasin Wijaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Saham Lain di BPR

nihil  
Nihil.

#### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

##### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Vivin Novitasari Sutrisno
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Erry Hermawan
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

##### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Thony Wijaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Yasin Wijaya - Kakak Kandung
2.	Nama	Ronny Abdikesuma
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Saham Lain di BPR	
-------------------	--

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Yasin Wijaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Thony Wijaya - Saudara Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

nihil

Hubungan Keluarga Komisaris Utama dengan Pemegang Saham Pengendali yaitu Saudara Yasin Wijaya adalah Kakak Kandung.

### 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

#### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp312.308.256
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp183.529.200

#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp110.477.064
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

#### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem	Rp36.552.110



Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp15.294.100</b>

#### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>



## 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp15.120.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

## 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp2.164.320
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

## 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	1,83 : 1
-------------	----------



2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,74 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,02 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,17 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	22 Januari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Evaluasi Kinerja BPR Bulan Desember Tahun 2023		
2.	Tanggal Rapat	23 Januari 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Perkembangan Lapoan Kinerja Keuangan Bulan Desember Tahun 2023 dan RBB Internal Tahun 2024		
3.	Tanggal Rapat	07 Maret 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Perkembangan Lapoan Kinerja Keuangan Bulan Februari Tahun 2024		
4.	Tanggal Rapat	15 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Evaluasi Kinerja BPR Bulan Maret Tahun 2024		
5.	Tanggal Rapat	25 Juni 2024



	Jumlah Peserta	5 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Perkembangan Lapoan Kinerja Keuangan Bulan Mei Tahun 2024	
6.	Tanggal Rapat	08 Juli 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Evaluasi Kinerja BPR Bulan Juni Tahun 2024	
7.	Tanggal Rapat	21 November 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Evaluasi Kinerja BPR Bulan Oktober Tahun 2024 dan Pembahasan RBB	

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Thony Wijaya
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ronny Abdikesuma
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	7 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus



Pada Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

nihil.

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>1 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>



Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian yaitu Penyelesaian Kredit Debitur an. Drs. Alfi Syahrin SH.

**17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

nihil.

**18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Prima Sejahtera untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 15 April 2025

PT BPR Prima Sejahtera

Dibuat oleh

Vivin Novitasari Sutrisno  
Direktur Utama

Erry Hermawan  
Direktur

Disetujui Oleh

Thony Wijaya  
Komisaris Utama

Ronny Abdikesuma  
Komisaris



Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian yaitu Penyelesaian Kredit Debitur an.  
Drs. Alfi Syahrin SH.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Prima Sejahtera untuk tahun 2024.  
Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 15 April 2025

PT BPR Prima Sejahtera

Dibuat oleh

Vivin Novitasari Sutrisno  
Direktur Utama



Erry Hermawan  
Direktur

Disetujui Oleh

Thony Wijaya  
Komisaris Utama

Ronny Abdikesuma  
Komisaris